

BAB II

Latar Belakang Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Respon Pihak yang Terlibat dalam Pembangunan Dam *Hydropower*

Mulai dirilisnya program pembangunan rangkaian dam *hydropower* di Ethiopia menjadi titik awal dari membengkaknya hutang negara karena keterbatasan sumber daya serta finansial. Sementara dalam meningkatkan akses terhadap energi alternatif bersifat vital bagi masalah kemiskinan yang sedang melanda. Rencana perluasan jaringan listrik melalui pembangunan rangkaian dam *hydropower* secara terus menerus sudah melewati batas permintaan domestik dan menimbulkan resiko keuangan nasional, sehingga menimbulkan kontroversi mengenai prioritas pemerintah terhadap proyek tersebut. Di samping itu, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Ethiopia terkait rencana pembangunan dam *hydropower*, juga akan menempatkan setidaknya sebanyak 85% fungsi nasional bergantung pada tenaga air yang menjadi sumber pembangkit listrik dan akan terus meningkat hingga 95% apabila seluruh rangkaian dam berfungsi maksimal. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi kekuatan Ethiopia baik dalam sektor ekspor impor maupun sektor agrikultural.

Bagaimanapun, dalam sudut pandang positif pemerintah Ethiopia, pembangunan dam *hydropower* merupakan langkah awal untuk memperbaiki situasi dengan meningkatkan pendapatan nasional serta meminimalisir dampak bencana kekeringan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam prosesnya, berlangsungnya pembangunan dam *hydropower* tidak hanya mempengaruhi ekonomi penduduk, namun juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan. Terkait pihak-pihak yang mendukung pemerintah Ethiopia agar program pembangunan dam tersebut terlaksana, baik melalui dukungan secara finansial maupun penandatanganan kerja sama bilateral guna melakukan investasi. Meskipun pada kenyataannya, keputusan pemerintah Ethiopia melakukan pembangunan dam Gilgel Gibe III mengakibatkan penderitaan masyarakat minoritas atas berbagai tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM

yang mengesampingkan moralitas dan menyimpang dari tujuan awal pembangunan dam *hydropower* itu sendiri.

2.1 Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Dam Gibe III

2.1.1 Hak Mendapatkan Perlindungan

Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin, menghormati dan memenuhi hak asasi setiap rakyatnya. Dalam hal ini, Pemerintah merupakan pemegang tanggung jawab terbesar dalam memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak rakyatnya. Sebagai seorang pemimpin negara yang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi rakyat dapat diartikan bahwa pemerintah beserta jabatan di bawahnya dilarang melakukan pelanggaran dan mampu memberikan jaminan perlindungan HAM. Sementara dalam tanggung jawabnya untuk menghormati hak-hak rakyatnya, pemerintah diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap segala tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM, serta menjaga perdamaian dan keamanan rakyatnya. Sedangkan dalam tugasnya untuk memenuhi hak-hak rakyatnya, pemerintah diharapkan dapat melakukan langkah-langkah yang bertujuan untuk merealisasikan pemenuhan hak-hak rakyat, seperti kegiatan pasar dan penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat (Tamirat, 2015).

Dalam kasus pelanggaran HAM dalam proyek pembangunan dam Gilgel Gibe III di Ethiopia, penulis melihat bahwa pemerintah Ethiopia telah menyimpang dari tanggung jawabnya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak rakyatnya, terutama suku-suku minoritas. Dengan adanya tindakan kekerasan berupa penganiayaan, pembunuhan, dan menyertakan tindakan pemerkosaan, berarti bahwa pemerintah Ethiopia telah melakukan pelanggaran terhadap hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan kebebasan dan menyimpang dari

beberapa pasal dalam Konstitusi FDRE dan perjanjian internasional.

Sebagaimana yang tertulis dalam Konstitusi FDRE pasal 13 ayat 1 bahwa seluruh organ di berbagai tingkatan dalam pemerintahan memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak setiap rakyat termasuk mencegah adanya tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM; Konstitusi FDRE pasal 41 ayat 4 tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mewajibkan negara untuk meningkatkan alokasi sumber daya demi ketersediaan jaminan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya (Tamirat, 2015).

Lebih lanjut, tindakan pemerintah juga telah menyimpang dari beberapa instrumen regional, seperti *European Convention on Human Rights* yang diadopsi tahun 1950 dalam pasal 3 yang melarang adanya tindakan penyiksaan; *The American Convention on Human Rights* tahun 1969 pasal 5 yang sangat menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak fisik, mental dan integritas moral; *African Charter on Human and Peoples' Rights* tahun 1981 melarang segala bentuk tindakan eksploitasi dan degradasi manusia yang merendahkan martabat manusia; *Arab Charter on Human Rights* yang diadopsi tahun 2004 dimana selain melarang adanya tindakan penyiksaan baik secara fisik maupun psikis, juga memerintahkan untuk melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan (OHCHR, APT, APF, 2010).

Sedangkan beberapa Konvensi Internasional yang telah dilanggar oleh pemerintah Ethiopia adalah sebagai berikut: Pasal 2 ayat 1 dalam *International Covenant on Economic, Social Cultural Rights* (ICESCR) yang mewajibkan seluruh anggota konvensi untuk meningkatkan alokasi sumber daya secara maksimal dengan maksud untuk merealisasikan hak-hak yang diakui dalam konvensi tersebut dengan segala cara yang tepat; *Universal Declaration of*

Human Rights pasal 5 yang melarang adanya penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, ataupun segala tindakan yang merendahkan martabat sesama manusia; *International Covenant on Civil and Political Rights* pasal 7 dan pasal 10 yang juga melarang adanya tindakan penyiksaan dan perampasan kebebasan yang seharusnya diperlakukan penuh kemanusiaan dan penghormatan harkat dan martabat sebagai manusia; *United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 15, dan pasal 16 (OHCHR, APT, APF, 2010).

2.1.2 Hak untuk Hidup

Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang dimilikinya sejak lahir dan salah satunya adalah hak untuk hidup. Melindungi keberlangsungan dan perwujudan hak-hak dasar tersebut merupakan kewajiban bagi setiap individu maupun negara. Hak untuk hidup dalam aspek sosial dapat berupa sikap saling menghormati keberadaan individu lain beserta dengan hak-hak yang dimilikinya.

Dalam kasus pelanggaran HAM di proyek pembangunan dam Gilgel Gibe III ini, kesalahan pemerintah yang utama adalah mengikutsertakan kekerasan dalam proses persiapannya untuk ekspansi wilayah pembangunan, yang mana salah satunya berupa tindakan pembunuhan terhadap suku-suku minoritas yang memberikan penolakan. Tindakan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh pihak militer atas doktrin pemerintah untuk melakukan pemindahan suku-suku minoritas secara paksa ini jelas telah melanggar konstitusi FDRE pasal 39 tentang Hak-hak Bangsa, Kebangsaan, dan Masyarakat Ethiopia yang menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki oleh setiap rakyat Ethiopia dan

melarang adanya tindakan diskriminasi di segala aspek (Chekole, 2012).

2.1.3 Hak atas Air

Air berada di posisi utama dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas air, baik dalam konteks sumber daya air maupun pelayanan air. Alokasi air sebagai air minum ataupun kebutuhan sehari-hari perlu menjadi prioritas utama negara. Lebih lanjut, negara semestinya juga memperhatikan konteks pelayanan air yang berupa masalah ketersediaan air, keterjangkauan akses air, kualitas, dan kesetaraan atas air (Al'Afghani, 2019). Mengingat bahwa air sangat penting bagi kehidupan setiap manusia, sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak atas air yang dimiliki oleh setiap rakyatnya. Namun, apa yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana negara menjalankan perannya untuk memenuhi hak atas air penduduknya di atas kepentingan negara dan perusahaan yang bersangkutan?

Sebagai sungai terbesar di Ethiopia yang bermuara di Danau Turkana di Kenya dan menjadi sarana pemenuhan kebutuhan air serta merupakan rumah dari 8 suku yang seluruh populasinya berkisar 200.000 jiwa serta beberapa suku di Kenya, pemerintah Ethiopia memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas aliran Sungai Omo. Namun, pembangunan dam *hydropower* Gilgel Gibe III sangat berdampak pada aliran air Sungai Omo, Danau Turkana, dan kehidupan suku-suku di sekitarnya. Pengaruh dominan yang dirasakan oleh suku-suku tersebut adalah menurunnya kualitas air dan berkurangnya volume air sungai, yang ikut berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka (Survival International).

Dalam hal ini, secara tidak langsung pemerintah telah menyimpang dari kewajibannya atas pemenuhan sumber daya air

dan pelayanan air sebagai kebutuhan utama rakyatnya beserta suku negara lain, juga sebagai hak atas air yang dimiliki oleh setiap individu dari suku-suku tersebut. Sebagaimana tertera dalam Konstitusi FDRE 1995 pasal 90 ayat 1 yang menyatakan bahwa mengacu pada perizinan negara, kebijakan-kebijakan harus ditujukan untuk menyediakan semua akses masyarakat Ethiopia terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, air bersih, perumahan, makanan, dan jaminan sosial. Meskipun belum ada konstitusi atau hukum Ethiopia yang secara khusus mengatur hak atas air yang dimiliki oleh setiap rakyat Ethiopia, namun keabsahan serta pernyataan dari pasal 90 ayat 1 Konstitusi FDRE tersebut wajib dijalankan serta dipatuhi.

Lebih lanjut, tindakan pemerintah Ethiopia untuk membangun dam Gilgel Gibe III dan berdampak pada kehidupan suku-suku yang menggantungkan hidupnya pada Sungai Omo, juga bertentangan dengan Proklamasi FDRE mengenai Manajemen Sumber Daya Air No.197/2000 yang meliputi hak alokasi air yang diarahkan untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya air guna memaksimalkan pemanfaatan bagi aspek sosial untuk rakyat Ethiopia (Worku, 2017).

2.1.4 Hak atas Tanah dan Properti

Meskipun dalam Konstitusi nasional telah menyatakan bahwa hak kepemilikan seluruh tanah di Ethiopia jatuh di tangan negara, namun penduduk berhak atas hak milik tanah mereka yang diwariskan secara turun temurun sebagaimana yang diatur dalam hukum internasional. Sehingga untuk memindahkan hak milik dan hak guna atas tanah tradisional tersebut, diperlukan persetujuan dari pemilik tanah dengan menyertakan konsultasi dan kompensasi tanpa adanya perampasan ataupun penyitaan.

Dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the*

Elimination of All Forms of Racial Discrimination/ICERD) yang telah diratifikasi oleh Ethiopia pada tahun 1976, menyatakan bahwa negara anggota memiliki kewajiban memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, dan menggunakan tanah dan sumber daya yang mereka huni dan miliki secara tradisional dan melarang segala bentuk perampasan. Namun, dalam proyek pembangunan dam Gilgel Gibe III terdapat indikasi perampasan tanah dari suku-suku adat/minoritas serta pemindahan secara paksa dengan menyertakan kekerasan yang dilakukan dari pihak pemerintah Ethiopia sendiri (Stirton, 2012).

Maka dari itu, komite PBB yang bertugas memantau kepatuhan negara terhadap isi dari ICERD, melihat bahwa pemerintah telah gagal dalam menghormati adat kepemilikan tanah tradisional serta bersalah atas adanya diskriminasi rasial. Lebih lanjut, dalam Komentar Umum/ General Comment 7 dari *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ ICESCR* juga berpendapat bahwa sepatutnya negara-negara pihak berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang akan terkena dampak sebelum melakukan pemindahan penduduk dengan maksud untuk mencegah atau bahkan meminimalisir kondisi yang membutuhkan kekerasan. Sementara itu, pada Januari 2009, USAID menulis laporan bahwa dalam proyek dam Gilgel Gibe III, suku-suku adat/minoritas telah diabaikan oleh pemerintah Ethiopia dan mendapatkan tindakan diskriminasi rasial dari masyarakat kota karena dianggap terbelakang atas dasar perbedaan gaya hidup, pengetahuan yang masih minim, dan cara berpekaian mereka (Stirton, 2012).

2.1.5 Hak atas Pembangunan

Pada dasarnya, hak atas pembangunan masih berkaitan erat dengan hak atas tanah dan properti. Pasalnya, apabila adanya

pelaksanaan pembangunan mempengaruhi kondisi tanah dan bangunan disekitarnya, baik secara internal melalui pemindahan kepemilikan tanah dan properti di dalamnya, maupun secara eksternal dengan menimbulkan dampak yang signifikan. Deklarasi mengenai hak atas pembangunan (Declaration of Rights of Development/DRTD) sendiri mulai diadopsi dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.41/128 pada 4 Desember 1986 yang mendefinisikan hak atas pembangunan sebagai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang untuk secara bebas berkontribusi dan menikmati perkembangan ekonomi dan politik dimana ia berada. Dalam hal ini, kontribusi dalam perkembangan ekonomi dan politik yang dimaksudkan adalah segala tindakan yang ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik dengan menyertakan peran aktif dari pihak bersangkutan demi tujuan bersama (Getachew B. , 2009).

Selama proses persiapan pembangunan dam Gilgel Gibe III, meskipun sudah terjalin diskusi mengenai dampak pembangunan serta visi misi dari pembangunan dam, namun opini masyarakat minoritas masih dibatasi. Pasalnya, dalam diskusi tersebut, pemerintah tidak menjelaskan dampak lanjutan terhadap lingkungan secara obyektif, serta masih terdapatnya ketidaksetujuan suku-suku minoritas atas pemindahan serta kompensasi semu yang tidak sesuai dengan hasil diskusi. Dengan adanya tindakan kekerasan serta perampasan tanah dan pemindahan paksa, secara tidak langsung pemerintah Ethiopia telah melanggar pasal 43 dalam Konstitusi FDRE yang melihat hak atas pembangunan merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan demokratis. Konsep inti yang dimuat dalam Konstitusi FDRE pasal 43 adalah mengenai jaminan terhadap hak atas pembangunan berkelanjutan, hak untuk meningkatkan standar

hidup, serta hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional (Getachew B. , 2009).

Sementara itu, pembangunan Gilgel Gibe series, terutama dam Gilgel Gibe III dinantikan oleh banyak aktor pemegang kekuasaan dan kepentingan. Mengesampingkan membengkaknya pinjaman nasional, pemerintah Ethiopia semakin memperluas kerjasamanya guna merealisasikan rencana pembangunan dam. Disinyalir bahwa pembangunan dam Ethiopia ini merupakan proyek terbesar di Afrika dan akan menjadi harapan baru bagi rakyat Afrika. Dimulai sejak pembangunan dam Gilgel Gibe I dan dam Gilgel Gibe II hingga rencana proyek pembangunan dam Gilgel Gibe III yang mengikutsertakan banyak pihak sebagai partner kerjasama regional maupun sasaran permintaan bantuan finansial.

Dam *hydropower* Gilgel Gibe III yang mulai dibangun sejak tahun 2006 hingga 2016 pada awalnya didukung oleh Bank Dunia, EEPCo, dan para diaspora Ethiopia. Sebelum ketiga aktor tersebut menginjakkan kaki ke dalam proyek Gilgel Gibe III, pembangunan terhenti karena keterbatasan finansial yang hanya mengandalkan pendapatan negara dari sektor agrikultur. Kemudian muncullah World Bank dan diaspora-diaspora Ethiopia yang memberikan pinjaman kepada pemerintah Ethiopia dan sebagai bentuk kerjasama sehingga pembangunan dam dapat dilanjutkan. Namun, pada tahun 2008, *World Bank* tidak lagi mendanai secara penuh karena mulai ketatnya persaingan dengan para kontraktor.

Dimulainya pembangunan dam Gilgel Gibe III pada tahun 2006 hingga selesai menandakan terjalinnya kerjasama Ethiopia dengan beberapa instansi sektor finansial dari negara-negara maju seperti Dongfang Electronic Corporation yang menandatangani memorandum dengan EEPCo kemudian dibacking oleh ICBC untuk mendanai pembangunan Gibe III, European Investment Bank (EIB) namun berhenti mendanai karena terdapat *alternative financing*¹ pada tahun 2010,

¹ *Alternative finance* (Keuangan Alternatif) mengacu pada metode atau proses keuangan yang tidak berasal dari sumber tradisional seperti bank, saham, atau pasar yang terikat kontrak, namun seringkali dilakukan melalui transaksi online. Dalam metode keuangan ini, terdapat beberapa jenis metode, diantaranya peer-to-peer lending (P2P), crowdfunding, balance-sheet lending, dan invoice trading. Dalam kasus EIB berhenti mendanai karena Ethiopia mulai menggunakan metode P2P Lending yang dianggap telah mampu mendorong pertumbuhan di

Exim Bank of China yang dibacking oleh Tebian Electric Apparatus Stock Co.,Ltd (TBEA), juga mengikut sertakan African Development Bank (AfDB) yang memberikan pinjaman terbesar sebanyak 250 juta dollar.

Kerjasama yang diperluas pemerintah Ethiopia dengan beberapa organisasi ekonomi internasional serta negara-negara regional Afrika Timur tersebut (terutama yang berbatasan dengan Ethiopia) juga diklaim sebagai kompensasi atas dampak yang disebabkan pembangunan dam *hydropower* kepada masyarakat lokal serta keperluan komersial. Disamping kenyataan bahwa klaim tersebut tidak terealisasi sepenuhnya, dalam proses pembangunannya pun mengesampingkan hak-hak warga suku sekitarnya dengan pemindahan secara paksa melalui tindak kekerasan, pencemaran sumber air bagi kehidupan warga, serta dampak sosial dan dampak lingkungan lainnya.

Lalu bagaimana sikap aktor-aktor utama pendukung pembangunan dam *hydropower* terhadap dampak sosial dan lingkungan juga pelanggaran HAM warga suku sekitar sebagai akibat pembangunan dam *hydropower* Gilgel Gibe III? Mengapa tidak menghentikan kerjasama dan tetap memberikan bantuan pinjaman terhadap proyek tersebut?

2.2 Respon Perusahaan terhadap dampak pembangunan dam Gilgel Gibe III

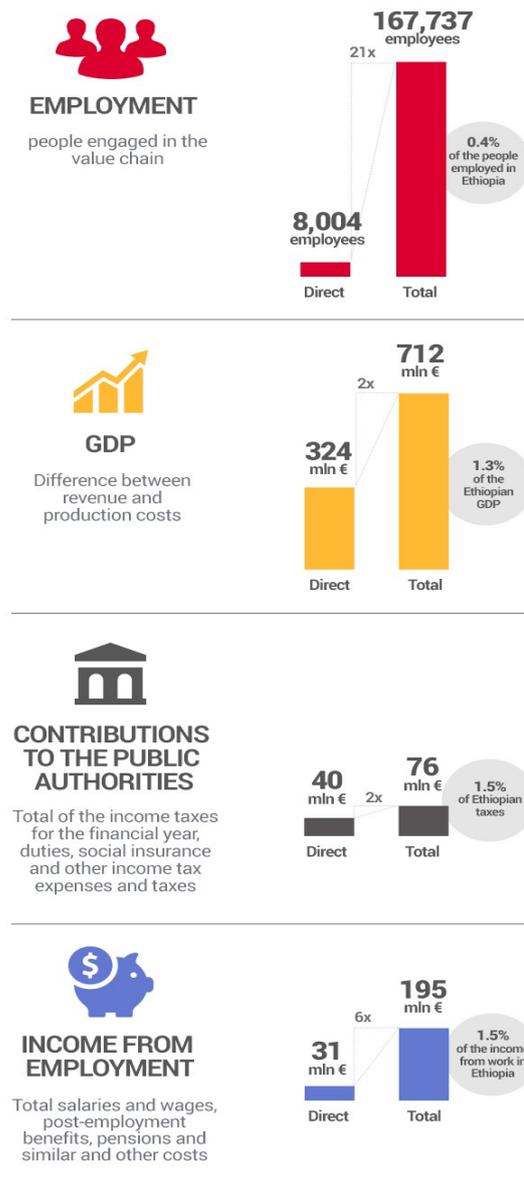
2.2.1 The Salini Impregilo Groups

Kerjasama antara pemerintah Ethiopia dengan perusahaan Salini Impregilo yang berasal dari Italia sudah terjalin sejak tahun 1957. Oleh karenanya, perusahaan konstruksi ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan sosial dan ekonomi Ethiopia. Hingga pada tahun 2015, kontribusi Salini Impregilo tercatat telah meningkatkan PDB Ethiopia sebesar 1,3%, pendapatan rumah tangga dan pajak sebesar 1,5 %, serta meningkatkan pendapatan dari seluruh

sektor jasa keuangan dan lebih menguntungkan dengan prosedur keuangan yang transparan dan saling menguntungkan bagi peminjam maupun yang memberi pinjaman. (<https://internationalbanker.com>)

pekerjaan, keuntungan, upah dan dari biaya-biaya lainnya sebesar 0,4% (Salini Impregilo).

Gambar 2.1
Pengaruh Perusahaan Italia Salini Impregilo terhadap Pertumbuhan Sosial Ekonomi Ethiopia



Sumber: Salini Impregilo web site (<https://ethiopia.salini-impregilo.com/>).

Dalam Gambar 2.1 di atas, dapat dikatakan bahwa Perusahaan Salini Impregilo milik Italia, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan Ethiopia di segala aspek, mulai dari berkontribusi besar dalam peningkatan jumlah tenaga kerja sebanyak 0,4% dari 167.737 tenaga kerja Ethiopia, menyumbang peningkatan GDP sebanyak 1,3% dari GDP Ethiopia, menyumbang peningkatan pendapatan pajak dari fasilitas umum sebesar 1,5% dari pajak umum Ethiopia, dan meningkatkan jumlah total penghasilan dari tenaga kerja Ethiopia sebesar 1,5% (Salini Impregilo).

Beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan oleh pemerintah Ethiopia yang pernah mengikutsertakan peran Salini Impregilo antara lain: pembangunan dam Legedadi tahun 1964 – 1970; pembangunan dam Little Belles pada tahun 1986 – 1992; dam Dire pada tahun 1996 – 1998; serta pembangunan dam Gigel Gibe I dan II. Selanjutnya, kerjasama antara pemerintah Ethiopia dengan Salini Impregilo berlangsung hingga sekarang dalam proyek pembangunan pembangkit energi selanjutnya. Oleh karenanya, dalam pembangunan dam Gilgel Gibe III, pemerintah Ethiopia kembali menggandeng Salini Impregilo sebagai perancang konstruksi dam dalam kontraknya yang ditanda tangani pada tahun 2006.

2.2.1.1 Salini Impregilo dan Pelanggaran HAM dalam Pembangunan Dam Gilgel Gibe III

Pada awal rencana pembangunan dam Gibe series, pemerintah Ethiopia secara langsung menjalin kerjasama dengan Salini Impregilo sebagai perancang konstruksi dam. Sehingga kontribusinya terhadap peningkatan situasi sosial ekonomi di Ethiopia sudah dimulai sejak pembangunan dam Gilgel Gibe I hingga Gibe series berikutnya. Namun, pada saat pembangunan dam Gilgel Gibe III, Salini sempat melepaskan kontrak kerjasamanya dengan Pemerintah Ethiopia setelah konstruksi dam

selesai dikarenakan adanya isu pelanggaran hak asasi suku-suku yang tinggal di sekitar wilayah pembangunan.

Pada bulan April tahun 2012, sebuah NGO Internasional yang bertujuan menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi HAM bagi rakyat-rakyat kecil bernama Survival Internasional bersama dengan EU, US, UK, Italia, dan Bank Dunia, membuat petisi untuk melaporkan dan menuntut Salini atas pelanggaran HAM terhadap suku-suku ethiopia yang terjadi menyangkut pembangunan dam Gilgel Gibe III. Dalam laporannya kepada OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pada tahun 2016 tersebut, Salini diduga telah menghiraukan situasi suku-suku lokal sebelum melakukan pembangunan dam. Lebih lanjut, Salini yang sebelumnya telah menjanjikan bahwa suku-suku bersangkutan akan mendapatkan kompensasi atas program banjir buatan yang akan dilakukan sebagai uji coba, tidak kunjung terealisasikan sehingga suku-suku tersebut menderita kelaparan dan kehilangan lahan tinggal di tengah bencana kekeringan yang sedang melanda (Rakita, 2016).

Dalam tuntutanannya, Survival International memaparkan bahwa lokasi yang digunakan sebagai tempat pembangunan dam merupakan wilayah yang sangat berperan penting sebagai penunjang kehidupan suku-suku baik di Ethiopia maupun Kenya (Danau Turkana). Salini dinilai telah mengabaikan bukti-bukti penting, membuat janji-janji palsu kepada suku-suku, dan melakukan tindakan kasar yang melanggar hak asasi yang dimiliki oleh suku-suku. Selanjutnya, Survival International juga membahas diabaikannya isu kelaparan serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan konstruksi Italia tersebut (Tekle, 2016).

2.2.2 African Development Bank (AfDB)

The African Development Bank atau yang kerap disebut AfDB/ADB merupakan sebuah institusi pembangunan ekonomi multilateral yang anggotanya terdiri dari 80 negara, diantaranya 54 negara-negara Afrika, dan 26 negara non-regional. AfDB merupakan buah dari kesepakatan antar negara-negara Afrika yang ditandatangani di Sudan pada tahun 1963, yang kemudian negara-negara non-Afrika ikut bergabung, dan AfDB pun mulai beroperasi pada tahun 1966. AfDB diharapkan mampu berkontribusi dalam kemajuan pembangunan ekonomi maupun sosial negara-negara anggotanya baik secara individual maupun secara kelompok (African Development Bank Group web site). Oleh karenanya, AfDB mendukung negara-negara anggotanya dengan melakukan perubahan dan mengalokasikan sumber investasi serta memberikan saran-saran kebijakan dan bantuan teknis guna mendukung pembangunan (African Development Bank Group, 2013).

Sebagai salah satu negara anggota AfDB sejak tahun 1964, Ethiopia telah menerima berbagai kemajuan dalam pembangunan sumber daya, terutama dalam pembangunan ekonomi serta berbagai infrastruktur. Lambat laun, AfDB mengalihkan fokus dukungannya untuk menyokong pembangunan proyek berskala lebih besar sesuai dengan prinsipnya yaitu Country Strategy Paper (CSP) mengenai selektivitas strategis. Menurut kriteria AfDB dalam kategori proyek berskala besar tersebut adalah pembangunan dam hydropower Gilgel Gibe III. Sehingga pada tahun 2009, AfDB menyetujui proposal pemerintah Ethiopia dan bersedia mendanai pembangunan dam Gilgel Gibe III sebesar US\$250 juta (African Development Bank Group, 2013).

Meskipun banyak pihak yang menolak dilanjutkannya pembangunan dam Gilgel Gibe III karena dianggap akan mempengaruhi kondisi ekosistem dan lingkungan di sekitarnya, namun AfDB mengaku menyetujui proposal pendanaan proyek

tersebut setelah melakukan penafsiran terhadap dampak sosial dan lingkungan secara penuh. Terkait kritik dari berbagai NGO mengenai tindakan AfDB yang mendukung terlaksananya kembali pembangunan dam Gilgel Gibe III melalui laporan ESIA (*The Environment and Social Impact Assessment*), AfDB mengaku bahwa tidak terlibat dalam tindakan yang dimaksudkan dalam poin-poin ESIA tersebut serta menilai bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam sebuah tuntutan karena belum dimasukkan ke dalam rancangan EPA/*Environment Protection Authority* (International River, 2009).

Sementara itu, AfDB menyatakan mengetahui betul bahwa pembangunan dam Gilgel Gibe III memberikan dampak negatif bagi suku-suku lokal di sekitarnya, namun mengingat bahwa dari penafsiran dampak sosial lingkungan yang dilakukan sebelum mendanai proyek tersebut, Gibe III juga akan memberikan dampak positif bagi berbagai pihak, terutama bagi masyarakat Ethiopia. Mengenai isu pelanggaran hukum domestik yang dilakukan oleh pemerintah Ethiopia seperti pemindahan secara paksa, pelanggaran hak tanah, perampasan sumber kehidupan (hilangnya lahan pertanian dan tempat tinggal), AfDB mengklaim bahwa Gilgel Gibe III akan memberikan kompensasi kepada mereka yang kehilangan dalam bentuk kehidupan yang lebih baik setelah proyek tersebut selesai (kompensasi dalam bentuk tanah pertanian yang lebih luas dan subur, lahan tempat tinggal baru, aliran listrik yang lebih merata, dan sebagainya (International River, 2009).

Namun pada bulan Juli tahun 2010, akhirnya AfDB menarik bantuannya dalam proyek pembangunan Gibe III bersamaan dengan European Investment Bank (EIB). Sebelumnya, Bank Dunia memberikan saran kepada NGO-NGO yang terlibat dalam pembangunan dam Gilgel Gibe III untuk menarik bantuan penuh mereka dan menjalin kerjasama melalui sub-kontrak. Bank Dunia

menilai bahwa sejumlah tindakan-tindakan yang terindikasi sebagai kekerasan dan pemaksaan serta dampak sosial lingkungan dari proyek pembangunan tersebut dapat membahayakan organisasi-organisasi tersebut karena disamping melanggar kode etik dalam syarat memberikan bantuan, juga melanggar kebijakan perlindungan suku-suku lokal Ethiopia. Tetapi, meskipun AfDB dan EIB yang berperan sebagai pihak utama yang mendanai proyek Gilgel Gibe III menarik bantuan mereka secara penuh, kedua Bank tersebut masih memberikan dukungan dan jaminan selesainya pembangunan dam sesuai dengan sub-kontrak.

Lalu, apakah pembangunan Gilgel Gibe III menjadi terhambat karena ditariknya pendanaan oleh AfDB dan EIB? Jawabannya adalah tidak, karena sebelumnya pada tahun 2009, pemerintah Ethiopia juga menggandeng dua perusahaan asal China yaitu Dongfang Electric Corporation yang berperan sebagai penyedia komponen hydro-mekanis dan elektro-mekanis, Chinese company TBEA, ICBC/*Industrial and Commercial Bank of China Ltd.* Yang memberikan bantuan dana sebesar US\$495 juta, serta bekerjasama dengan pemerintah Italia yang memberikan pinjaman dana sebesar US\$250 juta (Hathaway, 2010).

2.2.3 EEPCo / *Ethiopian Electric Power Corporation*

EEPCo merupakan perusahaan listrik milik Negara Ethiopia yang berdiri sejak awal tahun 1950an. EEPCo memiliki tugas untuk menyediakan energi listrik yang memadai, menyediakan transmisi daya yang responsif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, serta menjamin perlindungan lingkungan masyarakat. EEPCo merupakan pemain utama sebagai penyedia sektor energi di Ethiopia sehingga memiliki kontribusi besar dalam perjalanan pembangunan Ethiopia, maka dari itu pengaruh EEPCo pun meluas mencakup pengembangan

pembangunan nasional, investasi, konstruksi, manajemen pembangkit listrik, dan transmisi daya.

Sebagai satu-satunya perusahaan negara yang bertanggung jawab terhadap pengadaan energi listrik secara merata bagi masyarakat Ethiopia, EEPCo juga berkontribusi dalam mendukung pembangunan dam Gilgel Gibe series. Sejak pembangunan dam Gilgel Gibe I, EEPCo berperan sebagai pengawas, pengadaan sumber energi listrik, serta penanggung jawab proyek mewakili pemerintah Ethiopia. Dan puncak kinerja EEPCo adalah pembangunan dam Gilgel Gibe III yang digadangi akan menjadi pembangkit listrik terbesar pada saat itu (The World Folio).

Melalui pembangunan dam Gilgel Gibe III, EEPCo berusaha untuk memenuhi misinya menyediakan energi listrik yang merata bagi seluruh rakyat Ethiopia. Namun, terkait tuntutan dari berbagai pihak terhadap keputusan pemerintah untuk tetap membangun Gibe III, EEPCo pun ikut memberikan respon dengan mengeluarkan *assessment* terkait dampak sosial dan lingkungan dari proyek tersebut. Sebagai perusahaan domestik yang memiliki kekuatan untuk menjaga kestabilan kondisi negara di berbagai sektor, EEPCo juga memiliki tanggung jawab terhadap isu-isu krusial seperti pelanggaran hak atas suku-suku yang ada di wilayah pembangunan dam, isu lingkungan, serta dampak pembangunan dam Gibe III yang ikut mempengaruhi kehidupan suku-suku yang tinggal di Danau Turkana, Kenya, sebagaimana tertulis di peraturan EEPCo yang diadaptasi dari kebijakan pemerintah Ethiopia mengenai jaminan perlindungan HAM selama pembangunan proyek berlangsung. Meskipun, EEPCo telah mengeluarkan *assessment* mengenai dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan dam Gilgel Gibe III, EEPCo melimpahkan tanggung jawab mengenai isu-isu tersebut ke pemerintah Ethiopia yang menjanjikan ganti rugi melalui peningkatan kesejahteraan hidup

bagi masyarakat Ethiopia (Business and Human Rights Resource Centre, 2016).

2.3 Respon Negara terhadap dampak pembangunan dam Gilgel Gibe III

2.3.1 Kenya

Meskipun Kenya tidak memiliki peranan langsung selama pembangunan dam Gilgel Gibe series di Ethiopia yang disinyalir akan memberikan pemerataan dan kemudahan akses aliran energi listrik antar negara, namun dampak yang dihasilkan sebagai akibat pembangunan dam dapat dirasakan secara langsung oleh warganya yang tinggal di sekitar dan menggantungkan kehidupannya terhadap Danau Turkana. Dalam bab ini, penulis akan membatasi pembahasan dalam konteks bagaimana Kenya merespon dampak dari pembangunan dam, baik yang terjadi di negara partner kerjasamanya tersebut maupun dampak yang dialami oleh warga negaranya sendiri, serta menjelaskan secara singkat urgensi Danau Turkana terhadap kehidupan warga Kenya yang tinggal disekitarnya.

Dalam proyek pembangunan dam Gilgel Gibe III, Ethiopia berencana akan mengekspor hasil energi listrik dari dam tersebut ke sejumlah negara-negara tetangga sebagai wujud dari kerjasama. Diantara nya akan diekspor sebesar 200MW ke Sudan dan Djibouti, 500MW ke Kenya, serta 50 MW ke Yaman (Hathaway, What Cost Ethiopia's Dam Boom? A look inside the Expansion of Ethiopia's Energy Sector, 2008). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa baik pemerintah Ethiopia maupun Kenya, saling bekerjasama untuk mendukung berdirinya dam Gilgel Gibe III tersebut atas kepentingan bersama yaitu ekspor impor energi listrik. Dibalik beberapa komentar kontradiktif terhadap tindakan kedua negara yang merupakan pemeran utama dalam proyek tersebut, keduanya semakin mendukung terselesainya pembangunan dam dengan menyediakan energi listrik yang lebih besar. Disamping itu, banyak pihak yang mengkritik

tindakan pemerintah Kenya yang memberikan respon positif dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah Ethiopia terhadap pembangunan dam Gibe III yang dinilai akan mempengaruhi Danau Turkana yang berada di wilayah otoritasnya sendiri (Vidal, 2015).

2.3.1.1 Danau Turkana

Dijuluki sebagai danau permanen terbesar Afrika di padang pasir sekaligus danau alkalin terbesar di dunia, Danau Turkana merupakan tempat tumbuhnya bermacam-macam spesies flora dan fauna yang langka dan memiliki spot-spot ditemukannya fosil-fosil hominid yang telah berkontribusi membantu para arkeolog dan antropolog dalam menjelaskan asal-usul manusia. Juga merupakan tempat dibangunnya pembangkit listrik tenaga angin yang digadangkan akan memberikan hasil memuaskan berupa megawatt paling besar di Afrika apabila proyek tersebut telah selesai. Oleh karenanya, Danau Turkana terdaftar sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO (Wambugu, 2018).

Suku-suku yang tinggal di sekitar Danau Turkana merupakan suku-suku yang tidak terlalu aktif di sepanjang tepi Danau dan mendirikan pemukiman di wilayah seperti El Molo, Loyangalani, Kalokol, Ileret, Rendille, Daasanach, Gabbra. Namun, suku-suku tersebut menggantungkan kehidupannya terhadap aliran Danau Turkana sebagai penyokong kegiatan utama mereka yaitu pertanian, peternakan, memancing, dan sebagainya (Wambugu, 2018).

2.3.1.2 Respon Pemerintah Kenya Terhadap Gibe III

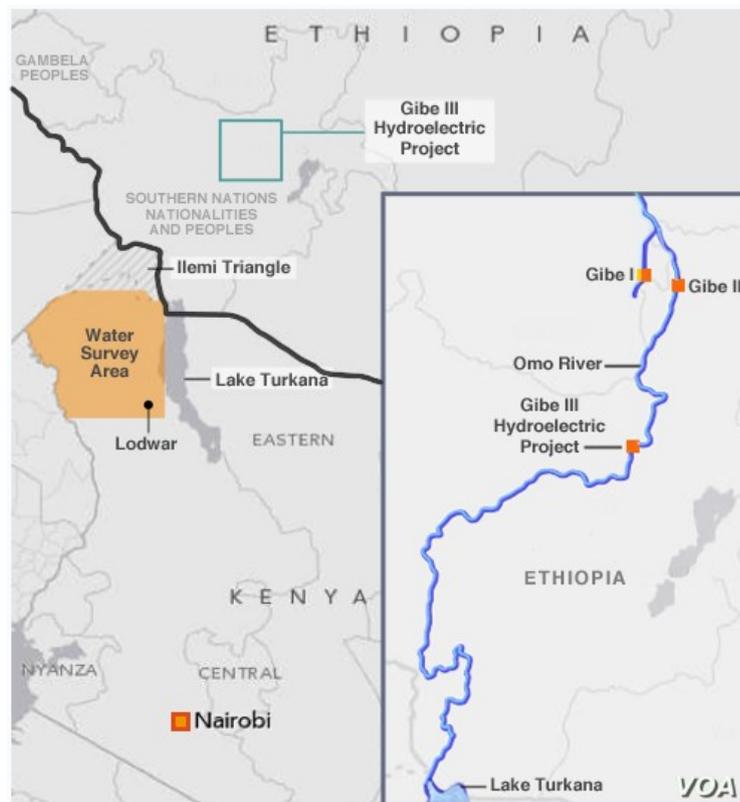
Sebagai negara yang terletak bersebelahan, hubungan antara Kenya dengan Ethiopia sudah terjalin sejak lama, terutama dalam sektor perekonomian yang saling ketergantungan. Dalam konteks hubungan bilateral di sektor pembangunan infrastruktur yaitu dam hydropower Gilgel Gibe III, Kenya memberikan proposal pinjaman dana kepada Ethiopia untuk mengeksport energi listrik yang

dihasilkan oleh Gilgel Gibe III sebesar 400-500MW nantinya. Namun hingga tahun 2014, dam Gilgel Gibe III baru mampu mengekspor energi listrik sebesar 60 MW ke Kenya (Bayeh, 2014).

Sebelumnya, ketika pembangunan dam Gilgel Gibe III belum terlaksana, terdapat berbagai assessment yang diajukan dari berbagai pihak termasuk dari pihak Kenya. Pemerintah Kenya semakin memfokuskan isu pembangunan dam Gilgel Gibe III yang dikhawatirkan akan berpengaruh pada volume Danau Turkana. Hingga pada November 2013, pemerintah Ethiopia dan Kenya menandatangani sebuah perjanjian pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam Danau Turkana bersama yang ditengahi oleh organisasi Program Lingkungan PBB (*The United Nations Environmental Program*), UNEP. Perjanjian tersebut diharapkan dapat menyelamatkan Danau Turkana oleh banyak pihak yang memperjuangkan keselamatan biota flora dan fauna Danau Turkana serta lingkungan di sekitarnya (Arnold, 2013).

Di sisi lain, suku-suku yang tinggal di sekitar Danau Turkana mulai merasakan bahwa aliran sungai yang menjadi penyokong kehidupan mereka mulai mengering ketika dimulainya pembangunan dam Gilgel Gibe III. Meskipun sebelumnya volume air Danau Turkana berkurang dikarenakan temperatur suhu yang relatif tinggi dan perubahan cuaca yang tidak menentu, namun International Rivers menuturkan bahwa pembangunan dam Gilgel Gibe III akan membawa dampak yang lebih signifikan. Disinyalir bahwa Danau Turkana akan kehilangan volume airnya sekitar 70% setelah proyek pembangunan dam selesai. Lalu bagaimana dengan suku-suku disana? Tentu saja mereka terpaksa merasakan kemiskinan dan kelaparan karena air yang menjadi penyokong kegiatan sumber penghidupan mereka mulai mengering (Vidal, 2015).

Gambar 2.2
Peta dam Gilgel Gibe III yang terhubung langsung dengan
Danau Turkana



Sumber: Voa News (<https://www.voanews.com/>).

Seperti yang terlihat dalam gambar 3.2, bahwa Sungai Omo yang menjadi lokasi dibangunnya dam Gilgel Gibe I, II, dan III, terhubung langsung dengan Danau Turkana. Dampak yang diperkirakan akan terjadi berkepanjangan tersebut pun, memungkinkan menimbulkan dampak sosial lingkungan lain seperti menyebarnya konflik, baik antara suku-suku diperbatasan negara Ethiopia dan Kenya, maupun konflik lokal Kenya antara suku Rendille yang tinggal di seberang Danau dengan suku Turkana karena perebutan daerah aliran sungai yang tersisa, kelaparan, serta punahnya budaya (Vidal, 2015).

Mengesampingkan dampak yang mungkin terjadi di kedua negara, pemerintah Ethiopia semakin menolak gagasan-gagasan yang memberikan kesan buruk terhadap dam Gilgel Gibe III. Menurutnya, Gilgel Gibe III justru akan menyediakan lebih banyak pasokan air kepada Danau Turkana sehingga bisa memberikan kehidupan lebih baik di sekitarnya. Selain itu, Gibe III juga dinilai berperan penting dalam integrasi regional serta kerjasama ekonomi yang erat antara Ethiopia, Kenya, dan negara-negara lainnya. Mengingat kerjasama yang telah terjalin ini, sehingga pemerintah Kenya menolak ajakan Bank Dunia, serta organisasi-organisasi penyedia bantuan lainnya untuk memberikan teguran atau sanksi sebagai respon atas dam Gilgel Gibe III yang bersifat kontroversial (Vidal, 2015).

2.3.2 Djibouti

Hubungan antara Ethiopia dengan Djibouti terjalin dengan baik dalam sektor ekonomi, sejak Djibouti memutuskan untuk memperluas kerjasama dengan negara-negara sekitarnya. Kerjasama Ethiopia-Djibouti dimulai dengan menjalin hubungan interkoneksi ekonomi karena Djibouti memegang peran yang sangat penting sebagai penyedia akses pelabuhan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan ekspor impor Ethiopia, sehingga menimbulkan ketergantungan keamanan dan ekonomi. Di sisi lain, karena pertumbuhan ekonomi Djibouti terhalang dengan biaya penyediaan energi listrik berbahan bakar minyak yang sangat mahal, akhirnya kedua negara menjalin hubungan interkoneksi energi listrik regional pertama yang disahkan pada bulan Oktober 2011 lalu (Bayeh, 2014).

Setelah kerjasama Ethiopia-Djibouti dalam sektor energi listrik terjalin, Djibouti mendapatkan akses murah untuk mengimpor listrik sebesar 35 MW. Setelah dam Gibe III Ethiopia terealisasi sepenuhnya, Ethiopia dapat mengekspor sejumlah besar energi listrik kepada

Djibouti yang akan ditukar dengan sejumlah juta dollar dan mendapatkan kesempatan lebih baik lagi untuk menggunakan pelabuhan Djibouti yang merupakan pusat transportasi internasional utama. Jadi dapat dilihat bahwa hubungan kedua negara saling menguntungkan dimana Djibouti dapat mengalami peningkatan perekonomian dan menurunkan inflasi yang disebabkan produksi energi listrik berbahan bakar minyak sebelumnya. Kerja sama Ethiopia-Djibouti selanjutnya mengarah pada pembangunan infrastruktur dan pertukaran barang dan jasa satu sama lain.

Dengan hubungan kedua negara yang semakin erat, terbukti bahwa dam Gibe III Ethiopia memainkan peran penting dalam memfasilitasi hubungan ekonomi, keamanan, sosial, dan hubungan politik kedua negara. Meskipun, sejak awal peluncuran proyek dam hydroelectricity Ethiopia menuai banyak kontroversi terkait pelanggaran HAM serta dampaknya terhadap lingkungan domestik maupun lintas negara, Djibouti tidak memberikan respon jelas terhadap sanggahan-sanggahan negatif dan tetap bersikap positif dengan semakin mempererat hubungannya dengan Ethiopia (Woldegebriel, 2013).

2.3.3 Sudan

Hubungan antara Ethiopia dengan Sudan terjalin sangat baik dan telah melewati perjalanan panjang sejak berakhirnya Perang Saudara Ethiopia. Meskipun sempat timbul konflik politik yang memanas antara kedua negara akibat wafatnya Presiden Hosni Mubarak di Addis Ababa yang disinyalir melibatkan pihak Sudan, namun mampu dinormalkan kembali saat pecahnya konflik Ethiopia dengan Eritrea pada tahun 1998 (Shinn, 2002). Sejak saat itu, hubungan kedua negara terjalin baik, meliputi ekspor-impor minyak, energi listrik, dan menyediakan bantuan militer dalam konflik perebutan wilayah Abyei

oleh Sudan Utara dan Sudan Selatan, serta menjalin hubungan baik dengan Republik Sudan Selatan yang baru berdiri.

Ethiopia pun mulai mengeksport energi listrik yang dihasilkan dari dam hidroelektrik nya sejak 2010 dan Sudan pun membalasnya dengan mengeksport sejumlah besar minyak serta menyediakan akses pelabuhan untuk Ethiopia mengeksport produk pertaniannya. Lebih lanjut, hubungan kedua negara mengarah pada pembangunan infrastrukural guna menunjang peningkatan kerjasama ekonomi, sosial, dan politik yang semakin erat.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa pembangunan dam *hydropower* oleh pemerintah Ethiopia merupakan tembok penyangga kerjasama Ethiopia-Sudan yang berperan penting dalam hubungan timbal balik diantara keduanya (Bayeh, 2014). Sehubungan dengan adanya tindakan pelanggaran HAM serta dampak-dampak negatif dari berdirinya dam Gibe III, penulis melihat bahwa belum ada respon baik positif maupun negatif dari pihak Sudan terkait isu tersebut. Pasaunya, hubungan keduanya semakin meluas hingga menjadi simbol perdamaian dan keamanan regional sebagai sesama aktor utama dalam sektor politik negara "*Horn of Africa*" (Getachew, 2019).

Terutama Kenya, yang mendukung dan mementingkan kerjasama ekonomi dengan pemerintah Ethiopia, dan menghiraukan dampak negatif yang mempengaruhi kondisi sebagian penduduknya. Meski pada awalnya Kenya dan Ethiopia telah menjalin perjanjian yang diklaim akan meminimalisir dampak lingkungan dari dam Gilgel Gibe III, namun tindakan pemaksaan hukum melalui militer terhadap suku-suku Sungai Omo oleh pemerintah Ethiopia, pengrusakan tanah, air, serta ekosistem di sekitarnya yang juga menimbulkan dampak terhadap Kenya berupa berkurangnya volume sumber air Danau Turkana, tidak dapat dibenarkan karena termasuk dalam tindakan negara yang melanggar regulasi lingkungan dan melibatkan warganya untuk tujuan dan keuntungan finansial, yaitu revolusi

industri perdagangan dan peningkatan perekonomian (Aklilu Kahssay, 2013). Hal ini adalah apa yang dimaksudkan sebagai kejahatan menurut konsep *green criminology*, serta bertentangan dengan apa yang disebut sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan.